



Radar Bali

Hadiri Karya Tawur Balik Sumpah di Pura Dalem Cengkok Bupati Serahkan Dana Upakara Rp 1,2 Miliar

MANGUPURA, NusaBali

Tilem Kasa pada Wraspati Pon Krulut, Kamis (12/7), Bupati I Nyoman Giri Prasta didampingi anggota DPRD Badung I Nyoman Satria menghadiri Karya Tawur Balik Sumpah di Pura Dalem, Banjar Cengkok, Desa Adat Cengkok, Desa Baha, Kecamatan Mengwi. Karya ini merupakan rangkaian Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan, Padudusan Agung Menawa Ratna medasar Tawur Balik Sumpah Utama di Pura Dalem, Desa Adat Cengkok yang puncaknya pada 18 Juli mendatang. Guna mendukung karya tersebut, Bupati menyerahkan bantuan dana upakara secara simbolis sebesar Rp 1,2 miliar.

Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih atas terlaksananya karya agung di Pura Dalem Desa Adat Cengkok. Hal ini sangat sejalan dengan prioritas pem-



BUPATI I Nyoman Giri Prasta didampingi anggota DPRD Badung I Nyoman Satria menghadiri Karya Tawur Balik Sumpah di Pura Dalem, Banjar Cengkok, Desa Adat Cengkok, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kamis (12/7).

angunan di Badung dalam upaya melestarikan seni, adat, agama, tradisi, dan budaya yang berlandaskan Tri Hita Karana. Hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat, sebagai bukti bahwa pemerintah membantu meringankan beban masyarakat seperti pembangunan pura maupun

bantuan dana upakara, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan urunan maupun peson-peson dana.

Bupati akan memback-up rencana pembangunan Pura Desa dan Puseh Desa Adat Cengkok hingga tuntas. Untuk itu, Bupati mengajak krama Cengkok tetap bersatu dan meningkatkan

rasa segilik, seguluk, seluwung-luwung sebayantaka.

Panitia Karya I Nyoman Rana melaporkan karya agung ini dilaksanakan serangkaian telah selesainya pembangunan pura dalam yang telah rampung 5 tahun lalu. "Karya ini telah kami rencanakan tiga tahun lalu. Kami matur suksma kepada Bapak Bupati Badung yang telah membantu karya ini sebesar Rp 1,2 miliar," jelasnya.

Selain pembangunan pura, krama Cengkok juga nanging tapakan barong ket yang sempat hilang 15 tahun lalu. Nanging tapakan ida bhatara, merupakan bantuan Penglingsir Puri Ubud. Ditambahkan, krama desa adat Cengkok berjumlah 15 sepaon, 44 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 225 jiwa. Rencananya krama akan melanjutkan pembangunan di Pura Desa lan Puseh. Untuk itu pihaknya akan kembali memohon bantuan kepada Pemkab Badung. @ asa

Edisi : Jumel 13 Juli 2018

Hal : 2



Radar Bali

DPRD Berharap Pemprov Hibahkan Aset yang "Nganggur"

Bangli (Bali Post) -

Keberadaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Kabupaten Bangli banyak yang "nganggur". Salah satunya bangunan eks-RSU Bangli yang sampai saat ini tak jelas pemanfaatannya. Prihatin melihat banyak aset Pemprov yang nganggur, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata berharap aset tersebut bisa dipinjam pakai atau dihibahkan untuk digunakan Pemkab Bangli.

Ditemui di Kantor DPRD Bangli, Selasa (10/7) kemarin, Kutha Parwata menyebutkan, ada sejumlah aset milik Pemprov Bali di Kabupaten Bangli yang nganggur dan kondisinya tak terurus. Selain bangunan eks RSU Bangli, aset milik Pemprov Bali yang juga terbengkalai berupa bangunan bekas di belakang RSU Bangli baru. Pihaknya pun mengaku prihatin melihat kondisi aset tersebut.

Menurut Kutha Parwata, agar tak terkesan kumuh, bangunan eks RSU Bangli yang berlokasi di Banjar/

Kelurahan Kawan cocoknya dimanfaatkan untuk tempat rekreasi berupa taman kota. Hanya, Pemerintah Provinsi punya rencana lain.

Sebagaimana hasil koordinasinya bersama Gubernur Bali sekitar dua tahun lalu, Pemprov berencana memanfaatkan eks bangunan tersebut untuk pembangunan rumah rehabilitasi pecandu narkoba. Bahkan saat itu gubernur mengatakan, rencana pembangunan rumah rehabilitasi itu sudah ada *Detail Engineering Design (DED)*-nya. Demikian juga dengan bekas bangunan yang ada di belakang RSU Bangli sekarang, rencananya akan dimanfaatkan Pemprov untuk lahan parkir. "Tapi sampai sekarang pembangunannya tak kunjung direalisasikan," ujar politisi PDI-P itu.

Karena belum jelasnya rencana pembangunan rumah rehabilitasi pecandu narkoba itu, Kutha Parwata menilai Pemkab Bangli masih punya peluang untuk memohon pemanfaatan aset tersebut.

Untuk itu pihaknya berharap Bupati Bangli kembali mengadakan koordinasi dengan Gubernur terpilih. Apakah Gubernur Bali terpilih mempunyai komitmen yang sama akan membangun rumah rehabilitasi narkoba atau tidak.

Jika tidak, maka Pemkab Bangli bisa memohon pemanfaatan eks bangunan RSU Bangli tersebut dengan sistem pinjam pakai untuk dijadikan taman kota. Demikian juga dengan bangunan bekas yang ada di belakang RSU Bangli sekarang, bisa dipinjam pakai untuk perluasan lahan parkir rumah sakit. "Selama ini beberapa masukan dari masyarakat di Kawan berharap eks bangunan RSU Bangli dimanfaatkan untuk taman kota. Masyarakat menolak kalau dijadikan rumah rehabilitasi pecandu narkoba. Hanya saja penolakan disampaikan belum ada disampaikan secara formal ke kami," imbuhnya. (kmb40)



Ngakan Kutha Parwata

Edisi : Rabu, 11 Juli 2018

Hal. : _____



Hibah Ngadat, Ramai-Ramai Pakrimik

Dewan Merasa Dianaktirikan

MANGUPURA- Pemberian hibah menyisakan polemik. DPRD Badung kompak pakrimik karena puluhan proposal hibah yang difasilitasi sampai saat ini tak kunjung cair.

Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Suyasa meminta hibah tersebut segera dicairkan. Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini menilai pencairan hibah sangat pelik walaupun Dewan dan eksekutif selalu bicara komitmen. Meski secara administrasi sudah lengkap, hingga kini tetap saja tidak kunjung cair. Suyasa meminta Ketua TAPD yang

juga Sekda Wayan Adi Arnawa segera mencairkan hibah sebelum membahas RAPBD Perubahan dan RAPBD induk 2019. Jika tetap tak bisa cair, Suyasa pun meminta dana hibah bisa di rasionalisasi. "Ini semua untuk kepentingan masyarakat," tegas Suyasa dalam rapat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan Badung 2018 dan RAPBD induk 2019, Senin (9/7) lalu yang dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Ketua TAPD Wayan Adi Arnawa.

Hal yang sama juga dilontarkan anggota Komisi II Drs. Nyoman Mesir. Dia merasakan seperti dianaktirikan dalam hal pencairan hibah ini. Jika disalurkan oleh warna tertentu (parpol), hibah cair dengan gampang. Namun jika

disalurkan oleh warna lainnya, hibah sangat sulit untuk cair. "Sepanjang secara administratif lengkap, harus segera dicairkan. Kami tidak ingin ada kesan seperti anak tiri," tegas anggota Dewan dari Kuta Selatan tersebut.

Di bagian lain, Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata menegaskan, hibah yang sudah masuk dalam APBD wajib untuk segera dicairkan. "Hibah ini kan sudah masuk APBD, mestinya bisa dicairkan," tegasnya.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata menilai, hibah yang disalurkan Dewan semua digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dia meminta TAPD peka dan langsung memberikan tanggapan. "Semuanya untuk mas-

Sepanjang secara administratif lengkap, harus segera dicairkan. Kami tidak ingin ada kesan seperti anak tiri."

NYOMAN MESIR
Anggota Komisi II

arakat baik yang disalurkan eksekutif maupun legislatif," katanya.

Menanggapi hal ini, Ketua TAPD Badung Wayan Adi Arnawa berjanji segera menelusuri di mana letak tersumbatnya hibah ini sehingga tak kunjung cair. "Kami akan berkoordinasi dengan Bupati sehingga bisa segera dicairkan," pungkasnya. (dwi/dot)

Edisi : Rabu, 11 Juli 2018

Hal. : _____



Dewan Sebut Pencairan Hibah Pelik ✓

Mangupura (Bali Post) –

Anggota DPRD Badung menilai pencairan hibah di wilayahnya sangat pelik, lantaran puluhan proposal hibah yang difasilitasi dewan tak kunjung cair. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan Badung 2018 dan RAPBD induk 2019, Senin (9/7) kemarin.

Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Suyasa di hadapan Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Ketua TAPD Badung yang juga Sekkab Wayan Adi Arnawa meminta hibah tersebut segera dicairkan. "Pencairan hibah saat ini sangat pelik, walaupun dewan dan eksekutif selalu bicara komitmen dan walau secara administrasi sudah lengkap hingga kini tetap saja tidak cair. Kami sangat menyayangkan ini, karena

hibah yang kami fasilitasi tujuannya sama untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar itu meminta Ketua TAPD segera mencairkan hibah sebelum membahas RAPBD Perubahan dan RAPBD induk 2019. "Jika tetap tak bisa cair, kami meminta dana hibah bisa dirasionalisasi," katanya. Anggota Komisi II Nyoman Mesir juga merasakan seperti anak tiri dalam hal pencairan hibah.

Hal tersebut, kata Nyoman Mesir tidak boleh terjadi, karena bantuan yang disalurkan legislator sama dengan hibah yang dicairkan eksekutif untuk kepentingan masyarakat. "Sepanjang secara administratif lengkap, harus segera dicairkan. Kami tidak ingin ada kesan seperti anak tiri," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD

Badung Putu Alit Yandinata menegaskan, hibah yang sudah masuk dalam APBD wajib untuk segera dicairkan. "Hibah ini kan sudah masuk APBD, mestinya bisa dicairkan," tegasnya. Ketua DPRD Badung Putu Parwata menilai hibah yang disalurkan Dewan semua digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Untuk itu, dia minta TAPD peka dan langsung memberikan tanggapan.

"Semuanya untuk masyarakat baik yang disalurkan eksekutif maupun legislatif," katanya. Menanggapi hal ini, Ketua TAPD Badung Wayan Adi Arnawa berjanji segera menelusuri di mana letak tersumbatnya hibah ini sehingga tak kunjung cair. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati, sehingga bisa segera dicairkan. (kmb27)

Edisi : Selasa, 10 Juli 2018

Hal. : _____